



BUPATI BOMBANA

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 16 Tahun 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 91 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

h /

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/ 2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di pasar;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts-OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts-OT.210.4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik.

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK. 060 / 2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah.
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER / 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 10 / 2014 / SR.130/8/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 91 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
22. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECIERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga ECIERAN Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 5) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 3 Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2014.
 - (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan menjadi sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang disahkan dengan Peraturan Bupati Bombana.
- h ✓

- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan / atau udang berdasarkan RDKK yang di setujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (4) Dinas Pertanian bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Di tetapkan di Rumbia
Pada tanggal 06 NOVEMBER 2014


BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal 06 NOVEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2014 NOMOR :**

KESUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUBSEKTOR

TON

No	SubSektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Perikanan Pagar		691,670	418,540	1,227,620	235,000
2	Hortikultura		15,216	32,688	56,405	50,000
3	Peternakan		148,677	184,645	243,930	50,305
4	Peternakan	7,530	25,645	17,486	32,075	21,693
5	Perikanan Budidaya	2,715,236	57,260	-	-	-
	Jumlah	2.715.236	898,218	653,358	1.711,050	390,998

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

No	Kabupaten/kota	urea	SP-36	ZA	MPK	Organik	JUMLAH
1	Kumbia	2,00	4,00	5,00	6,00	7,00	343,996
2	Rumbia Tengah	47,136	33,362	20,845	11,771	5,512	118,626
3	Mataleo	53,461	44,369	13,363	51,126	7,349	169,697
4	Masaloka Raya	21,627	6,724	3,291	0,249	0,000	33,942
5	Rarowatu	64,218	52,464	18,102	93,589	12,844	241,218
6	Karowatu Utara	3,662	9,322	50,335	205,616	37,526	525,412
7	Laranga Jaya	1,111	1,822	53,210	306,089	61,697	865,623
8	Poleang Timur	1,111	1,822	53,404	314,336	73,314	1,302,004
9	Poleang Utara	1,111	1,822	54,792	322,805	208,764	1,414,271
10	Poleang Tenggara	1,111	1,822	18,102	32,563	6,983	156,940
11	Poleang Selatan	1,111	1,822	46,627	10,358	5,535	137,081
12	Poleang Tengah	1,111	1,822	70,917	8,562	6,655	135,279
13	Poleang	1,111	1,822	68,196	10,608	5,655	143,250
14	Poleang Barat	1,111	1,822	57,598	20,700	1,661	142,789
15	Tontonunu	1,111	1,822	18,102	32,155	6,470	148,292
16	Kabaena	33,157	15,562	18,102	2,045	4,793	74,659
17	Kabaena Selatan	37,624	8,721	18,102	0,399	0,192	70,039
18	Kabaena Barat	24,381	27,004	18,102	2,045	4,793	76,925
19	Kabaena Utara	53,705	17,782	5,486	39,654	8,299	134,924
20	Kabaena Tengah	15,365	3,638	6,034	0,249	4,912	30,198
21	Kabaena Timur	24,933	15,021	10,102	7,853	3,954	61,863
22	Matausi	23,583	16,935	0,000	0,241	1,022	41,781
Jumlah		2.715,236	898,218	653,358	1.711,050	390,998	6.368,860

BUPATI BOMBANA, H. TAFDIL 

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

105

No	Jenis Pupuk	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Urea	2.715.236	238.530	200.138	85.278	99.574	273.786	229.009	102.888	102.000	172.000	325.000	190.000	251.880
2	SP-35	595.218	58.584	37.868	10.238	73.772	168.005	28.000	3.000	0	100.000	220.000	0	0
3	ZA	653.358	19.400	68.491	37.805	48.290	101.055	13.939	32.000	500.999	76.884	70.000	60.000	0
4	NPK	1.711.050	74.140	158.760	34.020	142.740	185.700	217.800	97.000	100.000	183.900	208.240	120.000	727.000
5	Organik	390.998	61.984	36.828	22.740	35.770	37.453	48.256	20.000	37.878	36.678	38.476	0	8.375
	Jumlah	6.368.860	492.741	512.084	216.081	400.146	765.999	537.786	327.920	649.629	580.595	702.377	377.205	806.297

BUPATI BOMBANA, 

H. TAFDIL 

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : Urea

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pertanian	2.013,890	175,720	144,870	199,500	71,500	8,500	5,500	10,250	105,700				55,1
2	Pertanian	146,885	14,560	11,875	4,250	5,200	19,200	13,360	8,800	13,030				11,180
3	Pertanian	388,525	36,070	31,350	11,263	13,884	43,410	35,538	23,584	34,628	2,381		40	51,100
4	Pertanian	74,836	7,280	6,038	2,415	2,990	8,370	6,547	4,410	6,680	3,953		4,125	15,290
5	Pertanian Budidaya	91,100	5,000	6,000	7,500	9,000	2,000	3,500	5,000	9,400	11,400	2,400	5,200	10,200
	Jumlah	2.715,236	238,630	200,138	85,278	99,574	273,786	229,609	152,044	262,526	172,055	265,087	181,630	554,881

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

KEPUTUSAN

TANGGAL

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : SP-36

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	621,970			2,390	51,015	171,179	17,400				84,500		84,500
2	Hortikultura	45,246			1,807	4,030	9,534	1,373	5,541	8,436	4,436	6,337		4,922
3	Perkebunan	148,097	12,124	8,002	5,941	13,417	31,342	4,369	4,962	4,246	10,067	20,887		15,985
4	Peternakan	25,645	1,020	1,320	0,900	2,090	4,760	0,680	0,770	2,730	3,170	3,870		3,435
5	Perikanan Budidaya	57,260	3,000	3,000	5,000	3,220	3,200	5,000	3,109	3,000	7,200	5,920	5,920	7,200
	Jumlah	898,218	68,584	47,868	36,238	73,772	168,005	28,162	29,268	94,752	109,078	120,529	5,920	116,041

TON

BUPATI BOMBANA, X

H. TAFDIL

KEBUTUHAN PUPUK BERSUSUDI TAHUN 2014
 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : ZA

1000

No	Sub sektor	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Agst.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	418,540	31,750	44,005	24,250	31,120	30,000	50,000	33,985	40,255	49,670	44,925	44,600	
2	Hortikultura	32,688	2,528	3,445	1,875	2,375	3,000	4,720	2,590	3,235	3,840	3,530	3,450	
3	Perkebunan	184,645	13,875	19,305	10,675	13,600	25,000	3,000	14,910	17,550	23,140	19,630	19,610	
4	Peternakan	17,486	1,250	1,736	1,005	1,100	2,555	0,384	1,288	1,949	2,234	1,961	1,935	
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	653,358	49,403	68,491	37,805	48,290	101,055	13,959	52,773	62,999	78,884	70,046	69,655	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMIRAN VII

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NO. 41 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : NPK

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	1.227,620	50,19	50,19	50,19	50,19	50,19	50,19	50,19	50,19	50,19	50,19	50,19	50,19
2	Tanaman Perikanan	156,405	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315
3	Perkebunan	294,950	14,410	30,870	46,230	61,590	76,950	92,310	107,670	123,030	138,390	153,750	169,110	184,470
4	Peternakan	32,075	1,595	3,255	4,915	6,575	8,235	9,895	11,555	13,215	14,875	16,535	18,195	19,855
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.711,050	74,140	158,760	34,020	142,740	185,700	217,800	67,275	191,475	183,900	208,240	120,00	127,00

BUPATI BOMBANA, X


H. TAFDIL

PERATURAN BUPATI BOMBANA
TAHUN 2014
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : Organik

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Sub sektor I BUK	235,000	-	-	20,000	3,000	25,000	28,000	20,000	24,000	34,000	2,000	-	-
2	Hortikultura	53,000	-	-	2,000	20,000	7,000	8,000	5,000	3,000	3,000	0	-	-
3	Pesemburan	80,305	1,000	7,150	-	7,000	11,235	7,520	-	9,802	10,200	800	-	8,375
4	Peternakan	21,693	1,584	3,478	0,740	3,115	4,218	4,736	1,560	1,078	0,178	1,056	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	390,998	61,984	36,828	22,740	35,770	37,453	48,256	26,560	37,878	36,678	38,476	-	8,375

BUPATI BOMBANA, 

H. TAFDIL 